

Determinasi Makroekonomi terhadap IPM Indonesia: Analisis ARDL dan Relevansi Maqashid al-Shariah dalam Kebijakan Fiskal

**Ratih Farhani Avisya¹⁾, Muhammad Wakhid Musthofa²⁾, Muhammad Ghafur Wibowo³⁾,
Yasni Efyanti⁴⁾**

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 1ratihfarhani10@gmail.com

²Muhammad.musthofa@uin-suka.ac.id

³Muhammad.wibowo@uin-suka.ac.id

⁴Fakultas Syariah, IAIN Kerinci

⁴yasniefyanti@iainkerinci.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of macroeconomic indicators on the Human Development Index (HDI) in Indonesia from an Islamic economic perspective. This research employs a quantitative approach using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model with time series data from 1991 to 2022. The variables examined include inflation, economic growth (GDP), government expenditure, and unemployment rate. The results show that all variables simultaneously affect HDI. Partially, economic growth has a positive and significant effect on HDI in both the short and long term. Inflation has a positive and significant effect in the short term, while government expenditure does not have a significant effect on HDI. Meanwhile, the unemployment rate has a negative and significant effect in the long term. These findings highlight the importance of maintaining sustainable economic growth, managing unemployment effectively, and optimizing government expenditure policies in line with maqashid al-shariah principles to enhance the quality of human development in Indonesia.

Keywords: Human Development Index; Islamic Economy; ARDL; Economic Growth; Unemployment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indikator makroekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) serta data runtun waktu periode 1991–2022. Variabel yang dianalisis meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB), pengeluaran pemerintah, dan tingkat pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap IPM. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sementara itu, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengendalikan tingkat pengangguran, serta mengoptimalkan kebijakan pengeluaran pemerintah yang selaras dengan prinsip *maqashid al-shariah* guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Ekonomi Islam; ARDL; Pertumbuhan Ekonomi; Pengangguran

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan angka-angka makroekonomi, namun pada hakikatnya menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan manusia yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan. Proses pembangunan ekonomi mencakup lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, hal ini juga melibatkan transformasi menyeluruh yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Selama beberapa dekade terakhir, paradigma pembangunan telah beralih dari pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth-oriented approach*) menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada manusia (*human-centered approach*) (Surtiari et al., 2020). Pergeseran ini menandakan bahwa tujuan utama pembangunan seharusnya adalah kesejahteraan manusia daripada hanya melihat pertumbuhan ekonomi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting yang merefleksikan kualitas pembangunan suatu negara secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi tetapi juga dari sisi sosial dan kesejahteraan dasar masyarakat. Sejak tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) telah memperkenalkan IPM sebagai tolok ukur strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* menjadi parameter capaian Pembangunan melalui tiga dimensi esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*) (Anantika dan Sasana, 2020).

Berdasarkan data empiris, IPM Indonesia menunjukkan tren peningkatan sejak awal 1990-an. Berdasarkan data *United Nations Development Programme (2022)*, Indonesia mengalami peningkatan IPM dari 0,533 pada tahun 1991 menjadi 0,713 pada tahun 2022. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan masyarakat secara agregat. Meskipun terjadi peningkatan, posisi Indonesia dalam peringkat global masih relatif rendah, yakni berada pada peringkat 112 dari 191 negara pada tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi kemajuan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusianya. Pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan yang merata dan berkelanjutan, mengingat masih adanya kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi serta dinamika makroekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Dalam kerangka pembangunan manusia, variabel-variabel makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan belanja pemerintah memiliki peran yang sangat strategis. Inflasi yang tinggi berpotensi menurunkan daya beli dan memengaruhi konsumsi rumah tangga (Kearl, 1979). Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya berdampak pada daya beli individu, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan, sehingga menciptakan siklus negatif dalam perekonomian (Maharani dan Haq, 2020). Di sisi lain, Inflasi dalam tingkat moderat dapat memberikan rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nominal, yang pada gilirannya dapat merangsang investasi dan produksi.

Kajian menunjukkan bahwa inflasi moderat sering kali dianggap sebagai indikator dinamisme ekonomi yang sehat, di mana pengaruhnya dapat menciptakan insentif bagi sektor riil

untuk berkembang (Jha dan Dang, 2012). Hal ini tercermin dalam penelitian yang menemukan bahwa inflasi berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ketika berada di bawah ambang batas tertentu, sedangkan tekanan yang lebih tinggi dari inflasi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang berpotensi menghambat investasi jangka panjang dan mengurangi daya beli masyarakat (Adeyemi et al., 2023; Sule et al., 2024). Selain itu, moderasi inflasi di sekitar tingkat tertentu dapat memfasilitasi pengaruh positif yang dihasilkan oleh pengurangan suku bunga riil, yang mendorong lebih banyak investasi serta pengeluaran (Ehigiamusoe et al., 2019).

Sementara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berkontribusi terhadap meningkatnya pendapatan dan serapan tenaga kerja yang lebih efektif. Ketika ekonomi tumbuh secara konsisten, akan ada peningkatan dalam investasi dan konsumsi yang dapat mendorong terciptanya lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak hanya meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga membantu pemerintah dalam memberikan akses lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya mendukung pengembangan keterampilan tenaga kerja (Anugrah et al., 2020).

Dalam penelitian ini, pengangguran diposisikan sebagai indikator penting yang mencerminkan ketimpangan struktural pasar tenaga kerja dan sekaligus menjadi tantangan serius bagi pembangunan manusia. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi indikasi adanya ketidakseimbangan struktural dalam pasar tenaga kerja dan berdampak langsung terhadap dimensi ekonomi IPM. Ketidakseimbangan struktural yang terindikasi oleh pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial, yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja IPM secara keseluruhan, meskipun direct evidence untuk hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut dari penelitian yang lebih luas (Kurniasih dan Tampubolon, 2021). Di sisi lain, penelitian menunjukkan hubungan positif antara penyerapan tenaga kerja dan produktivitas sektor PDRB, di mana tingginya pengangguran menunjukkan potensi pemborosan sumber daya manusia yang seharusnya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan IPM (Jannah et al., 2022). Dengan demikian, mengurangi tingkat pengangguran tidak hanya akan memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga akan memperbaiki indikator IPM yang lebih luas, menciptakan siklus positif bagi pembangunan ekonomi di Indonesia (Indarwati dan Woyanti, 2023).

Berikutnya belanja pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur sosial dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks ini, pemerintah memanfaatkan kebijakan fiskal untuk mengalokasikan anggaran secara strategis, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan yang esensial bagi masyarakat. Kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang bukan sekedar meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih luas (Silalahi dan Ginting, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa IPM merupakan refleksi komprehensif dari keberhasilan pembangunan yang tidak hanya bersifat ekonomi, namun juga sosial dan manusiawi. Pemahaman terhadap dinamika antara variabel-variabel tersebut dan IPM menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).

Selama lebih dari tiga dekade terakhir, Indonesia mengalami berbagai siklus ekonomi yang memengaruhi capaian pembangunan manusia. Krisis moneter 1997-1998, transisi politik di awal 2000-an, dan pandemi COVID-19 pada 2020 menjadi beberapa titik krusial yang menguji

AL FIDDH OH – Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026

ketahanan sosial-ekonomi nasional. Periode 1991–2022 memberikan rentang waktu yang memadai untuk mengamati dinamika hubungan antara indikator makroekonomi dan IPM secara komprehensif. Namun demikian, sebagian besar kajian empiris di Indonesia cenderung menggunakan rentang waktu terbatas, sehingga kurang mampu mengungkap keterkaitan jangka panjang yang bersifat struktural dan dinamis.

Selain keterbatasan dari sisi temporal, sebagian besar penelitian sebelumnya juga tidak mengintegrasikan dimensi normatif keislaman dalam mengevaluasi pembangunan manusia. Padahal, dalam konteks negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, pendekatan pembangunan berbasis nilai memiliki urgensi tersendiri. Prinsip dasarnya memberikan orientasi filosofis mengenai tujuan akhir pembangunan: yakni keberlangsungan kehidupan yang bermartabat secara spiritual, sosial, dan ekonomi. Hal ini dapat memperkaya interpretasi terhadap temuan empiris dan memberikan dimensi etis terhadap arah kebijakan publik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menghadirkan novelty dengan dua kontribusi utama: pertama, mengkaji pengaruh indikator makroekonomi terhadap IPM dalam periode panjang dengan model ARDL yang mampu menangkap dinamika jangka panjang dan jangka pendek; kedua, memasukkan perspektif normatif Islam dalam pembahasan kebijakan pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini memberikan nilai tambah baik secara teoritis maupun praktis untuk pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam integrasi nilai keislaman di ruang kebijakan publik.

Penelitian ini juga berupaya menjawab kebutuhan akan pengembangan kerangka pembangunan manusia yang lebih kontekstual dengan realitas Indonesia. Melalui pemanfaatan data *time series* selama periode 1991–2022, penelitian ini menyajikan analisis empiris yang lebih representatif terhadap dinamika ekonomi makro Indonesia dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan kuantitatif yang sistematis, diharapkan hasil penelitian ini mampu menjawab kebutuhan akademik dan praktis dalam konteks pembangunan nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan manusia (*human development*) merupakan kerangka konseptual yang diperkenalkan secara global oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) melalui publikasi *Global Human Development Report* pada tahun 1990. Kerangka ini menawarkan reorientasi fundamental terhadap model pembangunan konvensional, dengan menggeser fokus utama dari pertumbuhan ekonomi semata menjadi ekspansi kapabilitas dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan (Fukuda-Parr, 2023). Perspektif ini dibangun di atas fondasi teoretis yang dikembangkan oleh Amartya Sen melalui *capability approach* yang menekankan kebebasan substantif individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai (Sen, 1999; Todaro dan Smith, 2021.).

Dalam kerangka konseptualnya, UNDP memandang pembangunan manusia sebagai suatu proses terstruktur yang bertujuan untuk memperluas beragam alternatif pilihan yang tersedia bagi individu dalam menjalani kehidupan mereka (*a process of enlarging people's choices*). Ekspansi pilihan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang kondusif bagi masyarakat

agar dapat menikmati *longevity* hidup yang berkualitas, kesehatan optimal, dan produktivitas tinggi dalam aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menekankan akumulasi modal fisik, paradigma ini menempatkan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan sekaligus (Anantika dan Sasana, 2020).

Untuk mengoperasionalkan konsep teoretis tersebut, UNDP mengembangkan instrumen pengukuran bernama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau lebih dikenal Human Development Index (HDI). Indeks ini berfungsi sebagai parameter komparatif yang memungkinkan evaluasi sistematis terhadap pencapaian pembangunan manusia suatu negara relatif terhadap negara lain. Keunggulan metodologis dari IPM terletak pada karakteristiknya yang multidimensional, mencakup tiga dimensi fundamental pembangunan manusia (Sagar dan Najam, 1998) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Dimensi Kesehatan dan Longevity** (*a long and healthy life*): Dimensi ini mengukur kapasitas masyarakat untuk menikmati kehidupan yang sehat dan berkepanjangan, yang merupakan prasyarat esensial bagi aktualisasi potensi manusia secara optimal.
2. **Dimensi Pengetahuan dan Kecakapan** (*knowledge*): Dimensi ini mengevaluasi akses dan kualitas pendidikan yang diperoleh masyarakat, yang berperan krusial dalam pengembangan kapabilitas kognitif dan keterampilan profesional.
3. **Dimensi Standar Hidup Layak** (*decent standard of living*): Dimensi ini mengukur kapasitas ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan material yang diperlukan bagi kehidupan yang bermartabat.

Pada tahun 2010, metode penghitungan IPM mengalami penyempurnaan metodologis, dengan perubahan pada indikator pendidikan dari angka melek huruf menjadi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta perubahan pada indikator standar hidup dari PDB per kapita menjadi Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita (Klugman et al., 2011). Modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi pengukuran pembangunan manusia dalam konteks global yang dinamis.

Sebagai instrumen diagnostik, IPM tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi komparatif antar wilayah, tetapi juga berperan sebagai kerangka referensial dalam perumusan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan menjamin kesinambungan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, IPM telah menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Bappenas, 2020).

Konsep Inflasi

Fenomena inflasi menggambarkan naiknya harga barang dan jasa secara luas dan konsisten dalam rentang waktu tertentu, yang menyebabkan turunnya nilai riil uang. Salah satu pendekatan klasik dalam memahami inflasi berasal dari *Quantity Theory of Money* yang diperkenalkan oleh Irving Fisher (1911) melalui persamaan $MV = PT$, di mana Inflasi terjadi ketika kenaikan jumlah uang yang beredar (M) berlangsung lebih cepat daripada pertumbuhan produksi atau output (T).

Ketidakseimbangan ini menyebabkan tekanan permintaan berlebih yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga.

Oleh karena itu, inflasi sebagai fenomena makroekonomi memiliki hubungan yang kompleks dengan pembangunan manusia, di mana pengaruhnya bersifat non-linear dan bergantung pada tingkat keparahan dan karakteristik struktural ekonomi. Dalam literatur ekonomi pembangunan, inflasi moderat (tingkat rendah hingga menengah) sering diasosiasikan dengan dampak positif terhadap pembangunan manusia melalui beberapa mekanisme transmisi. Inflasi moderat pada kisaran 2-5% dapat menstimulasi aktivitas ekonomi riil melalui penurunan biaya modal riil dan peningkatan investasi produktif, yang secara berkelanjutan mendorong pertumbuhan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Dalam konteks pembangunan manusia, efek stimulasi ini berpotensi meningkatkan alokasi sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan program sosial, yang merupakan komponen esensial dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sejumlah penelitian mengungkapkan hubungan antara IPM dan inflasi dengan hasil yang beragam. Menurut Nurlina et al (2023) inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Sementara itu, menurut Pangesti dan Susanto (2018) inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, di mana hasil tersebut sama halnya dengan penelitian (Runtunuwu, 2020) yang menemukan bahwasanya inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama periode tertentu. Adam Smith (1776) dalam *The Wealth of Nations* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital, peningkatan produktivitas, dan spesialisasi kerja. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi akan memperbesar pendapatan nasional dan meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor publik. Dalam kerangka *endogenous growth theory* (Romer, 1990), pertumbuhan yang disertai investasi pada pendidikan dan teknologi akan memberikan efek langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, pertumbuhan tanpa pemerataan akan gagal meningkatkan pembangunan manusia. Maka, pertumbuhan perlu dilihat secara inklusif, bukan hanya agregat.

Dalam beberapa penelitian terkait pertumbuhan ekonomi dan Indeks pembangunan Manusia terdapat variasi hasil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurlina et al. (2023) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan menurut Gultom dan Tini (2020) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM secara parsial, meskipun secara simultan seluruh variabel dalam model yang di uji memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM.

Konsep Pengeluaran Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan instrumen fiskal yang digunakan negara untuk membiayai pengeluaran sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pengeluaran pemerintah memiliki tiga peran utama, yaitu pengalokasian sumber daya, pemerataan pendapatan, serta menjaga kestabilan ekonomi. Dalam konteks pembangunan manusia, pengeluaran yang diarahkan dengan baik dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan sosial. *Wagner's Law* (Wagner dan Weber, 1977) menyatakan bahwa seiring

dengan meningkatnya pendapatan nasional, belanja pemerintah juga akan meningkat secara proporsional. Peacock dan Wiseman (1961) menambahkan bahwa tekanan sosial dan kebutuhan mendadak dapat menyebabkan lonjakan belanja pemerintah. Dalam konteks Indonesia, efektivitas belanja publik masih menjadi tantangan, terutama terkait dengan alokasi dan korupsi yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran pembangunan manusia.

Dalam penelitian Gultom dan Tini (2020), pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM secara parsial, yang mengindikasikan perlunya evaluasi efektivitas alokasi anggaran dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada penelitian Egary dan Sofyan (2024) ditemukan bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di DKI Jakarta. Sementara itu, dalam penelitian terkait pengeluaran pemerintah sektor kesehatan oleh Anantika dan Sasana (2020) dalam penelitian lingkup negara APEC menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap IPM.

Konsep Pengangguran

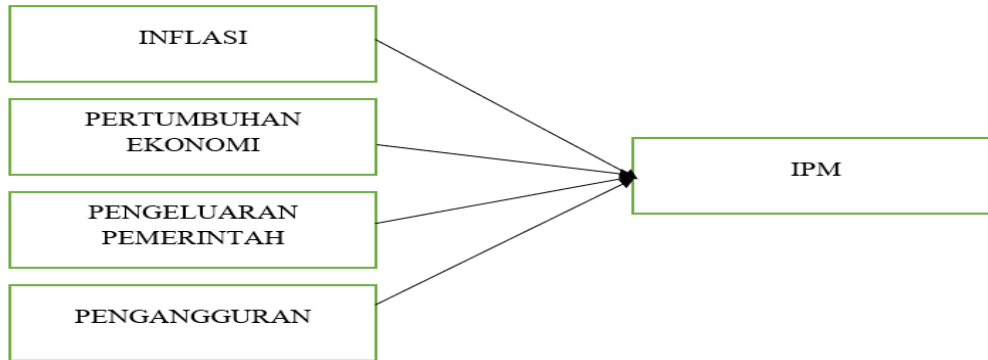
Pengangguran adalah kondisi ketika tenaga kerja yang tersedia tidak dapat terserap oleh pasar kerja. (Keynes, 1936) dalam *The General Theory of Employment, Interest, and Money* menyatakan bahwa pengangguran dapat berlangsung secara sistematis karena kekurangan permintaan agregat. Dalam perspektif pembangunan manusia, pengangguran berdampak langsung pada kemiskinan, kerentanan sosial, dan penurunan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Menurut *Okun's Law* (1962), terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Semakin tinggi pengangguran, maka akan semakin rendah kesejahteraan masyarakat.

Sen (1999) menambahkan bahwa kehilangan pekerjaan juga menghilangkan kebebasan dasar untuk memilih kehidupan yang bernilai. Oleh karena itu, penurunan pengangguran tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga kapabilitas sosial individu. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian Runtuwuwu (2020) bahwa pengangguran berdampak negatif dan signifikan terhadap IPM. Hasil lainnya ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Egary dan Sofyan (2024) bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Konsep Perspektif Ekonomi Islam dan Pembangunan Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, pembangunan manusia diposisikan sebagai tujuan sentral dari aktivitas ekonomi, bukan sekadar dampak sampingan dari pertumbuhan. Chapra (2008) mengartikulasikan bahwa pembangunan dalam perspektif Islam mengarah pada pencapaian *falāḥ* (kesejahteraan dunia dan akhirat) yang bersifat multidimensional. Konsep ini diperkuat oleh kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Al-Syatibi dan direinterpretasi oleh Auda (2010), mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dimensi-dimensi *maqāṣid* ini memiliki korespondensi substantif dengan indikator-indikator IPM, meskipun dengan spektrum yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan dimensi spiritual.

Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis



Pengujian Hipotesis:

- (H_0): Koefisien $\beta_k = 0$, yang berarti bahwa variabel X tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y.
- (H_1): Koefisien $\beta_k \neq 0$, yang menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Kriteria pengambilan keputusan: Hipotesis nol (H_0) ditolak jika nilai signifikansi $\leq 5\%$ ($\alpha = 0,05$).

Dengan demikian, rumusan hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran terhadap IPM
- H2: Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM
- H3: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
- H4: Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
- H5: Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diambil dari *Human Development Report* milik UNDP serta *World Bank*, yang tersedia secara daring. Data yang digunakan mencakup rentang waktu dari tahun 1991 hingga 2022. Variabel dalam penelitian ini meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen, sementara inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan tingkat pengangguran berperan sebagai variabel independen. Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, batasan operasional dan definisi masing-masing variabel disajikan dalam Tabel 1.

Dalam menganalisis hubungan antarvariabel, digunakan pendekatan model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Model ini dipilih karena mampu mengidentifikasi hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang bersifat tidak stasioner, serta memungkinkan analisis ulang terhadap *error correction term* (ECT). Penggunaan ARDL juga memberikan pemahaman

mengenai dinamika jangka pendek yang mengarah pada keseimbangan jangka panjang antar variabel yang diteliti (Nkoro dan Uko, 2016).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Sumber Data
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	UNDP
INF	Kenaikan harga barang secara umum di Indonesia (%)	World Bank Data
PDB	Laju pertumbuhan tahunan produk domestik bruto sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara (%)	World Bank Data
GOVEXP	Persentase pengeluaran akhir konsumsi pemerintah(%)	World Bank Data
UNEMP	Persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja, berdasarkan estimasi yang dimodelkan oleh ILO (Organisasi Buruh Internasional)(%)	World Bank Data

Sumber: Diolah untuk artikel ini

Metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) diterapkan untuk mengkaji hubungan antara variabel dalam model baik pada periode jangka pendek maupun jangka panjang, meskipun derajat stasioneritasnya berbeda, yaitu $I(0)$, $I(1)$, atau kombinasi keduanya. Keunggulan metode ini terletak pada fleksibilitasnya dalam menangani data time series yang tidak semuanya stasioner pada tingkat yang sama. Model awal yang digunakan dalam penelitian ini menghubungkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan variabel-variabel makroekonomi seperti inflasi (INF), Produk Domestik Bruto (PDB), belanja pemerintah (GEXP), dan tingkat pengangguran (UNEMP), yang diformulasikan dalam persamaan dasar:

$$IPMt = \alpha_0 + \alpha_1 INFt + \alpha_2 PDBt + \alpha_3 GEXPt + \alpha_4 UNEMPt + \varepsilon_t$$

Persamaan ini kemudian dikembangkan menjadi model ARDL untuk menangkap dinamika hubungan jangka pendek dan jangka panjang, dengan memasukkan lag dari masing-masing variabel:

$$\Delta IPMt = \beta_0 + \beta_1 \Delta IPMt - 1 + \beta_2 INFt + \beta_3 PDBt + \beta_4 \Delta GEXPt + \beta_5 \Delta UNEMPt + \gamma_1 IPMt - 1 + \gamma_2 INFt - 1 + \gamma_3 PDBt - 1 + \gamma_4 GEXPt - 1 + \gamma_5 UNEMPt - 1 + \varepsilon_t$$

Model ini kemudian disederhanakan ke dalam bentuk *Error Correction Term* (ECT), yang mencerminkan penyesuaian kecepatan menuju kondisi keseimbangan jangka panjang setelah terjadi deviasi atau ketidakseimbangan dalam jangka pendek:

$$\Delta IPMt = \beta_0 + \beta_1 \Delta IPMt - 1 + \beta_2 \Delta INFt + \beta_3 \Delta PDBt + \beta_4 \Delta GEXPt + \beta_5 \Delta UNEMPt + \phi ECTt - 1 + \varepsilon_t$$

Koefisien ϕ (phi) pada ECT menunjukkan seberapa cepat variabel IPM menyesuaikan kembali ke lintasan keseimbangan jangka panjang setelah mengalami guncangan dalam jangka

pendek. Nilai koefisien ini biasanya negatif dan signifikan jika terdapat hubungan jangka panjang antar variabel.

HASIL ANALISIS

Langkah awal memulai penerapan model ARDL adalah memeriksa bahwa seluruh data yang digunakan telah memenuhi syarat stasioneritas. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada Tabel 2, diketahui bahwa sebagian variabel sudah stasioner pada level, sementara sisanya menjadi stasioner setelah dilakukan differensiasi pertama. Tidak ada variabel yang memerlukan differensiasi kedua, sehingga model ARDL dinilai sesuai untuk digunakan dalam analisis ini. Selanjutnya, dilakukan pengujian kointegrasi dengan pendekatan *Bound Test*, yang hasilnya tercantum pada Tabel 3. Nilai F-statistik yang diperoleh sebesar 7,8149, melampaui nilai batas atas pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan jangka panjang yang signifikan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, mendukung temuan serupa dalam studi oleh Koyuncu dan Yalcinkaya (2022).

Untuk memastikan keandalan model ARDL yang dibangun, dilakukan pula serangkaian uji sensitivitas dan diagnostik (lihat Tabel 4 bagian c). Nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar 0,813258 menunjukkan bahwa sekitar 81,3% variasi dalam variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dideskripsikan dari variabel-variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah di sektor pendidikan, dan tingkat inflasi. Temuan ini menggarisbawahi kekuatan prediktif dari model yang digunakan. Uji asumsi klasik turut menunjukkan hasil yang mendukung validitas model. Uji normalitas dengan metode Jarque-Bera menghasilkan nilai sebesar 1,790808 dengan probabilitas 0,408443, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Ini berarti data berdistribusi normal dan hipotesis nol tidak ditolak. Sementara itu, hasil pengujian autokorelasi dan heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas masing-masing lebih besar dari 5%, sehingga tidak terdapat indikasi adanya autokorelasi maupun heteroskedastisitas dalam model, sebagaimana dijelaskan pula oleh (Ridha et al., 2021).

Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas Data

Variabel	Augmented Dickey-Fuller (ADF)		keterangan
	Level I(0)	First difference I(1)	
IPM	0.9733	0.0002	Stasioner pada I(1)
INF	0.0019	-	Stasioner pada I(0)
PDB	0.0031	-	Stasioner pada I(0)
GEXP	0.4915	0.0000	Stasioner pada I(1)
UNEMP	0.7413	0.0000	Stasioner pada I(1)

Sumber: Diolah untuk artikel ini

Tabel 3. Hasil Uji Kointegrasi

Tingkat Signifikansi	Nilai Kritis I(0)	Nilai Kritis I(1)	F-Statistik	Keterangan
1%	4.280	5.840	7.814945	Terdapat Kointegrasi
5%	3.058	4.223		

10%	2.525	3.560		
-----	-------	-------	--	--

Sumber: Diolah untuk artikel ini

Tabel 4. Hasil Estimasi Model ARDL

A. Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
C	-0.007023	-2.998563	0.0071
D_IPM(-1)	-1.592953	-6.247344	0.0000
D_IPM(-2)	0.245132	-1.615059	0.1220
INF	0.000336	2.612487	0.0167
INF(-1)	0.000662	4.606060	0.0002
PDB	0.001215	3.683850	0.0015
PDB(-1)	0.002354	5.723062	0.0000
D_GEXP	0.000935	0.768738	0.4510
D_UNEMP	-0.0000192	-0.017686	0.9861

Sumber: Diolah untuk artikel ini

B. Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
INF	0.000415	5.467532	0.0000
PDB	0.001478	7.313499	0.0000
D_GEXP	0.000587	0.793778	0.4424
D_UNEMP	-0.0000121	-0.017674	0.0084

Sumber: Diolah untuk artikel ini

C. Uji Sensitivitas

Uji	Nilai	Uji Lain	Nilai
R-square	0,813258	ECT	-1,592953 (0,0000)
Adj R-square	0,790849	Cusum	Stabil
Normalitas JB	1,790808 (0,4084)	Cusum SQ	Stabil
Autokorelasi (LM Test)	0,192417 (0,8266)		
Heteroskedastisitas (ARCH)	0,086972 (0,9170)		

Sumber: Diolah untuk artikel ini

Hasil analisis menunjukkan *Error Correction Term* (ECT) yang bernilai negative dan signifikan ditingkat 1 persen menandakan adanya proses penyesuaian sistem menuju keseimbangan jangka panjang setelah adanya gangguan dalam jangka pendek. Koefisien ECT sebesar -1,592953 merupakan representasi dari kecepatan penyesuaian yang tinggi. Koefisien yang negatif ini menandakan bahwa setelah terjadinya guncangan, sistem berusaha untuk kembali ke keadaan seimbang dalam waktu yang relatif cepat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Ridha et al., 2021).

Berdasarkan hasil estimasi model ARDL pada jangka pendek, variabel pertumbuhan ekonomi (PDB) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Koefisien PDB sebesar 0,001215 dengan tingkat signifikansi 1% ($p\text{-value} = 0,0015$), mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PDB sebesar 1 persen dapat mendorong kenaikan IPM sebesar 0,12 persen. Pengaruh positif ini juga terlihat dari lag PDB pada periode sebelumnya ($PDB(-1)$), yang memiliki koefisien sebesar 0,002354 dan signifikan kuat pada tingkat 1% ($p\text{-value} = 0,0000$), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpengaruh langsung, namun juga memiliki dampak berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurlina et al. (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

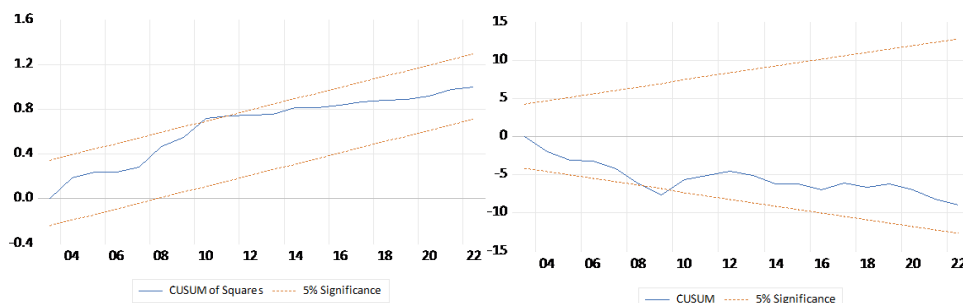
Berikutnya variabel inflasi (INF) turut memberikan dampak yang signifikan terhadap IPM dalam jangka pendek. Dengan nilai koefisien inflasi sebesar 0,000336 dan signifikan pada taraf 5% ($p\text{-value} = 0,0167$), serta nilai lag inflasi sebesar 0,000662 dengan signifikansi tinggi pada tingkat 1% ($p\text{-value} = 0,0002$). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks ekonomi Indonesia, tingkat inflasi yang terkontrol berpotensi mencerminkan dinamika konsumsi dan investasi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis, sehingga mendorong kualitas pembangunan manusia. Namun hasil penelitian tidak selaras dengan studi lainnya yang menyatakan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM sebagaimana yang diungkapkan Pangesti dan Susanto (2018). Hasil dari penelitian lainnya seperti oleh Runtunuwu (2020) juga berbeda yang memaparkan inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM.

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah (GEXP) dan tingkat pengangguran (UNEMP) dalam jangka pendek tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki koefisien 0,000935 dengan $p\text{-value}$ sebesar 0,4510, sementara variabel pengangguran memiliki nilai koefisien negatif -0,0000192 namun dengan signifikansi yang sangat rendah ($p\text{-value} = 0,9861$), dengan demikian, tidak ditemukan bukti yang memadai untuk menyimpulkan bahwa perubahan jangka pendek dalam variabel ini mempengaruhi IPM secara substansial. Sama halnya dengan beberapa penelitian terdahulu seperti dalam penelitian Gultom dan Tini (2020), pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM secara parsial. Kemudian merujuk pada penelitian Egary dan Sofyan (2024) ditemukan juga bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di DKI Jakarta. Dari penelitian terdahulu terkait pengangguran juga terdapat studi yang sejalan seperti penelitian yang dilakukan oleh Egary dan Sofyan (2024) bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Dalam jangka panjang, variabel pertumbuhan ekonomi (PDB) tetap menunjukkan hubungan positif yang signifikan terhadap IPM. Koefisien jangka panjang sebesar 0,001478 dengan signifikansi tinggi pada taraf 1% ($p\text{-value} = 0,0000$) memperkuat temuan sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan secara struktural turut mendorong capaian pembangunan manusia. Begitu pula dengan inflasi yang tetap berpengaruh positif dengan koefisien 0,000415 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Adapun variabel pengeluaran pemerintah (GEXP) dalam jangka panjang masih tidak signifikan (koefisien = 0,000587; $p\text{-value} = 0,4424$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah belum secara optimal terefleksi dalam peningkatan IPM. Menariknya, tingkat pengangguran dalam jangka panjang memiliki arah pengaruh negatif (koefisien = -0,0000121), meskipun nilai $t\text{-statistik}$ nya

kecil. Namun, secara probabilitas ($p\text{-value} = 0,0084$), variabel ini signifikan pada tingkat 1%, menunjukkan bahwa pengangguran yang tinggi secara struktural dalam jangka panjang dapat menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Gambar 1. Hasil Uji Stabilitas



Sumber: Diolah untuk artikel ini

Secara umum, model ARDL ini memiliki kinerja yang cukup baik dengan nilai R-square sebesar 0,8132 dan Adj R-square sebesar 0,7908, yang berarti sekitar 79% variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Selain itu, uji residual menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi, heteroskedastisitas, maupun penyimpangan normalitas, dan model stabil berdasarkan uji CUSUM dan CUSUM-squared. Hasil uji stabilitas menggunakan metode CUSUM dan CUSUM-squared menunjukkan bahwa model berada dalam batas kritis, yang mengindikasikan kestabilan parameter sepanjang periode estimasi. Artinya, tidak terjadi perubahan struktural yang signifikan dalam hubungan antar variabel selama kurun waktu penelitian, sehingga model ARDL yang digunakan dapat dikatakan reliabel dan valid untuk dianalisis.

PEMBAHASAN

Estimasi model ARDL yang telah dipaparkan diatas mengungkapkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mewakili pertumbuhan ekonomi sebagai determinan yang berpengaruh signifikan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang tervalidasi secara konsisten dalam kerangka temporal jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konstruksi epistemologi ekonomi Islam, fenomena ini merepresentasikan manifestasi dari prinsip *tazkiyah* (penumbuhan yang bersih) dan *islah* (perbaikan berkelanjutan), dimana aktivitas ekonomi produktif seharusnya tidak terbatas pada akumulasi kapital semata, melainkan diorientasikan pada transformasi kesejahteraan manusia secara holistik.

Peningkatan kapasitas produksi nasional yang tercermin dalam pertumbuhan PDB, ketika didistribusikan berdasarkan prinsip keadilan (*'adalah*), berpotensi menghasilkan eksternalitas positif berupa ekspansi kesempatan kerja, perbaikan aksesibilitas terhadap layanan publik esensial, serta efektivitas mekanisme redistribusi sumber daya ekonomi. Korelasi positif ini secara substantif mengonfirmasi harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tujuan fundamental syariah (*maqashid al-shariah*), utamanya dalam konteks perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui pemenuhan hak-hak fundamental manusia.

Hal ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM (Arisman, 2018; Nurlina et al., 2023; Pelinescu, 2015).

Dalam perspektif kebijakan makroekonomi, inflasi memiliki dampak positif juga negatif dalam perekonomian. Tingkat keparahan inflasi dapat diukur dari besarnya persentase kenaikan harga. Ketika inflasi berada pada tingkat yang rendah, yakni di bawah 10%, kondisi tersebut cenderung memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Inflasi ringan dapat mendorong peningkatan pendapatan nasional, yang selanjutnya menumbuhkan motivasi masyarakat untuk bekerja lebih giat, menabung, serta melakukan investasi. Namun, hal sebaliknya pun akan terjadi jika inflasi tidak terkendali maka dapat menyebabkan surutnya perekonomian. Hal ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Runtunuwu, 2020).

Temuan empiris menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat memberikan dasar bagi peningkatan IPM melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan peningkatan pendapatan, yang mendukung kontribusi berbagai item dalam IPM, termasuk pendidikan dan kesehatan (Megondaru dan Hasmarini, 2022). Fenomena ini dapat dikonseptualisasikan melalui kerangka *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum) dan *'adalah* (keadilan distributif) dalam ekonomi Islam, di mana stabilitas harga merupakan prasyarat bagi terciptanya ekosistem transaksi yang berkeadilan. Inflasi yang terkendali menjadi indikator berfungsinya mekanisme pasar secara proporsional tanpa distorsi yang diakibatkan oleh praktik-praktik non-produktif seperti spekulasi berlebihan, transaksi berbasis riba, atau manipulasi pasar (*gharar* dan *ikhtikar*).

Ketidaksignifikanan pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi IPM, baik dalam spektrum jangka pendek maupun jangka panjang, mengimplikasikan adanya inefisiensi struktural dalam alokasi anggaran publik dan lemahnya transmisi kebijakan fiskal terhadap variabel-variabel pembangunan manusia. Temuan ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai efektivitas peran pemerintah sebagai *khalifah* (pengelola) dalam memastikan alokasi dan distribusi sumber daya publik yang optimal. Dalam paradigma ekonomi Islam, kebijakan fiskal seyogianya tidak hanya berorientasi pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga pada perwujudan kesejahteraan sosial yang inklusif melalui prioritas sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi komponen fundamental IPM. Studi empiris yang dilakukan oleh Ningrum et al. (2020) juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Temuan ini juga mengindikasikan perlunya optimalisasi instrumen pembiayaan sosial Islam sebagai pelengkap kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong pembangunan manusia. Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi untuk memperkuat pembiayaan sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan komponen Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Literatur mengenai Islamic Social Finance (ISF) menunjukkan bahwa integrasi dana sosial Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan mampu membantu mengatasi kesenjangan pembiayaan pada sektor-sektor strategis yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh anggaran pemerintah (Tlemsani et al., 2023; Tok et al., 2022). Selain itu, pemanfaatan zakat dan wakaf secara produktif juga dinilai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia secara lebih inklusif dan berkelanjutan (Aziz et al., 2023).

AL FIDH OH – Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026

2025; Isa et al., 2024; Moh. Mufid & Muhammad, 2023). Dengan demikian, ketika transmisi pengeluaran pemerintah terhadap IPM belum berjalan optimal, penguatan instrumen ZISWAF dapat dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan yang selaras dengan prinsip keadilan distributif ('adalah) dan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dalam ekonomi Islam (Al-Ayubi & Halawatuddu'a, 2021; Mohd Zain et al., 2024).

Korelasi negatif yang signifikan antara tingkat pengangguran dan IPM dalam jangka panjang merupakan temuan empiris yang mengonfirmasi hipotesis teoretis tentang dampak destruktif pengangguran struktural terhadap pembangunan manusia. Dalam kerangka ekonomi Islam, pengangguran tidak hanya dipandang sebagai disfungsi pasar tenaga kerja, tetapi merepresentasikan anomali multidimensional yang mengancam integritas sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Konsep *kasb* (upaya memperoleh penghidupan halal) dalam tradisi ekonomi Islam menegaskan bahwa partisipasi produktif dalam aktivitas ekonomi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap individu. Penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwasanya pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM (Ningrum et al., 2020; Runtunuwu, 2020).

Analisis pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap IPM dalam kerangka model ARDL menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*quality growth*) memiliki kapasitas transformatif terhadap pembangunan manusia, sebagaimana dibuktikan oleh koefisien elastisitas jangka panjang yang substansial. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa ekspansi kapasitas produktif perekonomian, ketika disertai dengan distribusi yang adil, berpotensi menghasilkan multiplier effect terhadap dimensi-dimensi kesejahteraan manusia yang terintegrasi dalam IPM.

Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable growth*) merupakan manifestasi dari prinsip *khilafah* (pengelolaan yang bertanggung jawab) dan '*adalah* (keadilan), di mana kemajuan ekonomi diorientasikan pada pengembangan kapasitas individu dan masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi produktif dan spiritual mereka. Temuan-temuan empiris yang dihasilkan menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan kebijakan makroekonomi dengan prinsip-prinsip *maqashid al-shariah* untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pengelolaan sumber daya publik secara efektif mendukung pembangunan manusia seutuhnya (*al-falah*).

Dalam konteks kompetisi global yang semakin intensif, negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim perlu mengadopsi pendekatan kebijakan ekonomi yang holistik, yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sebagaimana diadvokasikan dalam paradigma ekonomi Islam kontemporer. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme transmisi spesifik yang menghubungkan variabel-variabel makroekonomi dengan komponen-komponen individual IPM, serta mengidentifikasi instrumen kebijakan inovatif yang dapat mengoptimalkan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dalam kerangka ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel inflasi, PDB, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran berpengaruh terhadap IPM. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mencerminkan

pentingnya ekspansi ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Inflasi moderat juga berdampak positif, mengisyaratkan bahwa stabilitas harga yang terjaga dapat mendukung pembangunan manusia. Sebaliknya, pengangguran terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, menandakan pentingnya penciptaan lapangan kerja dalam kerangka kasb dan istikhlaf. Sementara itu, belanja pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, mengindikasikan perlunya reformasi dalam tata kelola fiskal. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan perlunya kebijakan makroekonomi yang terintegrasi dengan maqashid al-shariah untuk mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan dan bernilai spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyemi, O., Afolabi, A., Olawumi, A., & Okunade, S. (2023). Inflation and Growth Nexus Revisited: Financial and Practical Implications of the Threshold Effect in Nigeria. *NIU Journal of Social Sciences*, 9(3), 59–67. <https://doi.org/10.58709/niujss.v9i3.1711>
- Ahmad Ridha, Nurjannah, & Ratna Mutia. (2021). Analisis Permintaan Uang di Indonesia: Pendekatan Autoegressive Distributed lag (Ardl). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 152–160. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4273>
- Al-Ayubi, S., & Halawatuddu'a, S. (2021). Maqasid Al-Sharia In Islamic Finance. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2), 197–215. <https://doi.org/10.30863/jad.v4i2.1823>
- Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di negara APEC. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(3), 167/1-167/15.
- Anugrah, K., Simanjorang, R. C., Hutabarat, A. R. H., Pakpahan, R. J., & Sipahutar, T. T. U. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 442. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.269>
- Arisman, A. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 113–122. <https://doi.org/10.15408/sjie.v7i1.6756>
- Auda, J. (2010). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Islamic Book Trust.
- Aziz, Y., Mansor, F., Waqar, S., & Zada, N. (2025). Zakat and Sustainable Development Goals (<sc>SDGs</sc>). Assessing the Ripple Effect of Obligatory-Alms Spending on Education. Empirical Evidence From Pakistan. *Asian Social Work and Policy Review*, 19(1). <https://doi.org/10.1111/aswp.70006>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*.

- Egary, E. A., & Sofyan, S. (2024). Pengaruh PDRB, belanja pemerintah fungsi pendidikan, dan pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2009–2022 di DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 569–578.
- Ehigiamusoe, K. U., Lean, H. H., & Lee, C.-C. (2019). Moderating effect of inflation on the finance–growth nexus: insights from West African countries. *Empirical Economics*, 57(2), 399–422. <https://doi.org/10.1007/s00181-018-1442-7>
- Fukuda-Parr, S. (2023). The Human Development paradigm: Operationalizing Sen’s ideas on capabilities. *Feminist Economics*, 9(2–3), 301–317.
- Indarwati, P. A., & Woyanti, N. (2023). Analisis Pengaruh Pdrb, Tenaga Kerja, Ump, Dan Ipm Terhadap Pengangguran Di 6 Provinsi Pulau Jawa TAHUN 2010 â€“ 2019. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(2), 46. <https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.393>
- Isa, Z. M., Ibrahim, D., Ali, N., Lestari, R., & Nurleli, N. (2024). NANOCREDIT FOR EMPOWERING THE UNDERPRIVILEGED: A COMPREHENSIVE SYSTEMATIC REVIEW. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 5(58), 61–74. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.58.2024.4417>
- Jannah, R., Rachmawati, H., & Dhitara, P. Y. A. (2022). Systematic Literature Review Analisis Pengangguran dan Soft Skill pada Besaran PDRB Jawa Timur. *Media Ekonomi*, 21(2), 1. <https://doi.org/10.30595/medek.v21i2.10257>
- Jha, R., & Dang, T. N. (2012). Inflation variability and the relationship between inflation and growth. *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*, 5(1), 3–17. <https://doi.org/10.1080/17520843.2011.608371>
- Kearl, J. R. (1979). Inflation, Its Effects on Wealth Distribution and Consumption Patterns. *The American Economic Review*, 69(1), 112–120.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Macmillan.
- Klugman, J., Rodríguez, F., & Choi, H. J. (2011). The HDI 2010: New controversies, old critiques. *Journal of Economic Inequality*, 9(2), 249–288.
- Koyuncu, C., & Yalcinkaya, J. (2022). The long-run impact of inflation on human development and poverty in Turkey. *Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences*, 8(3), 129–135.
- Kurniasih, C. E., & Tampubolon, D. (2021). Dekomposisi Produktivitas Pekerja Di Kabupaten Kampar Selama Wabah Covid-19: Analisis Shift Share. *Jurnal Daya Saing*, 7(3), 281–292. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v7i3.765>
- Maharani, A., & Haq, A. (2020). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 941–950. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14546>

- Moh. Mufid, & Adamu Abubakar Muhammad. (2023). Islamic Philanthropy and Public Policy: A Study of Zakat Fatwas from the New Order Era to the Post-Reform Era. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 201–230. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_01
- Mohd Zain, F. A., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Sheikh Ahmad Tajuddin, S. A. F., & Wan Abdullah, W. A. (2024). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with Maqasid al-Shariah: a blueprint for sustainable takaful operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 461–484. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2023-0422>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212–222. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Nkoro, E., & Uko, A. K. (2016). Autoregressive distributed lag (ARDL) cointegration technique: Application and interpretation. *Journal of Statistical and Econometric Methods*, 5(3), 63–91.
- Nurlina, N., Ridha, A., & Asnidar, A. (2023). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1990-2021. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 239–250. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7287>
- Pangesti, I., & Susanto, R. (2018). Pengaruh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics*, 5(1), 70–81.
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). *The Growth Of Public Expenditure In The United Kingdom*. Oxford University Press.
- Pelinescu, E. (2015). The Impact of Human Capital on Economic Growth. *Procedia Economics and Finance*, 22, 184–190. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00258-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00258-0)
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Runtunuwu, P. C. H. (2020). Analysis of Macroeconomic Indicators and It's Effect on Human Development Index (HDI). *Society*, 8(2), 596–610. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.246>
- Sagar, A. D., & Najam, A. (1998). The Human Development Index: A critical review. *Ecological Economics*, 25(3), 249–264.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>

- Sule, S. A., Hakim, L., Putro, T. R., & Pamungkas, P. (2024). The Impact of Inflation on the Business Cycle and Economic Growth: An Empirical Analysis. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 6(11), 274–286. <https://doi.org/10.31149/ijefsd.v6i11.5334>
- Surtiari, G. A. K., Romdiati, H., Katherina, L. K., Kusumaningrum, D., & Prasajo, A. P. S. (2020). Memahami kualitas sumber daya manusia OAP berdasarkan pendekatan people-centered : Studi di Kabupaten Tambrauw dan Sorong. *Masyarakat Indonesia*, 46(1), 1–14. <https://doi.org/10.14203/jmi.v46i1.870>
- Tlemsani, I., Zaman, A., Mohamed Hashim, M. A., & Matthews, R. (2025). Digitalization and sustainable development goals in emerging Islamic economies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(5), 890–914. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2023-0092>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (n.d.). *Economic Development (13th ed.)*. Pearson.
- Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence. *Sustainability*, 14(11), 6875. <https://doi.org/10.3390/su14116875>
- United Nations Development Programme. (2022). *Human Development Index (HDI)*.
- Wagner, R. E., & Weber, W. E. (1977). Wagner's Law, Fiscal Institutions, And The Growth Of Government. *The National Tax Journal*, 30(1), 59–68.